

LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2026

BALAI BESAR PENERAPAN

**MODERNISASI PERTANIAN
KEPULAUAN RIAU**



**BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN
RIAU
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI
PERTANIAN
2026**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, atas selesainya penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban dalam mengelola anggaran selama pada Triwulan I pada Tahun 2025 serta pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang harus dilaporkan secara akuntabel dan bersih menunjang kinerja pemerintahan yang dikelola dengan baik (*good governance*).

Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunan pertanian sepatutnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik melalui Laporan Kinerja.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian.

Buku Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau merupakan cerminan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian selama periode Triwulan I tahun 2025 dalam rangka pencapaian sasaran, yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Pertanian dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, benar, transparan, dan akuntabel.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian laporan ini disampaikan terima kasih yang sebesar- besarnya. Semoga laporan ini memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak yang membutuhkannya. Kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan kinerja dimasa- yang akan guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.

Tanjungpinang, 01 April 2026

Kepala Balai Besar,



Budi Hartono, S.P., M.P.

NIP.197304301999031001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. Tugas BRMP Kepulauan Riau yaitu untuk melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau merupakan UPT yang berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) menyelenggarakan fungsi a) Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; b) Pelaksanaan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; c) Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern; d) Pelaksanaan pengujian, diseminasi, pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi serta model pertanian modern; e) Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f) Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan program Pembangunan pertanian; g) Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; h) Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; i) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian; j) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian. Misi utama Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) adalah: a) Melaksanakan perekayasaan dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional; b) Melaksanakan penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian; c) Mengembangkan metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik Lokasi; d) Mengembangkan model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani; e) Melaksanakan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian.

Proyeksi perwujudan misi di atas dituangkan dalam Perjanjian Kinerja yang memuat 5 (lima) sasaran kegiatan dengan 6 (enam) indikator kinerja pada Tahun 2025. Indikator kinerja kegiatan Tahun 2026 berupa (1)Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan; (2) Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif; (3) Jumlah Benih/ bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan; (4) Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming* dan modern; (5) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau (Nilai); (6)

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau.

Hasil kinerja dikelompokkan menjadi beberapa kategori, kriteria penilaian sebagaimana yang digunakan oleh Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) di mana capaian kinerja dikategorikan dalam 4 kategori yaitu : (1) Sangat berhasil (capaian >100%), (2) Berhasil (capaian 80 – 100%), (3) Cukup berhasil (capaian 60 – 79%), dan (4) Tidak berhasil (capaian 0 – 59%). Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau, diperoleh hasil capaian kinerja BRMP Kepulauan Riau dikategorikan **Tidak Berhasil**, dengan rata-rata capaian indikator kinerja sebesar **32,01%**. Tercatat dari 6 (enam) indikator kinerja hanya 1 indikator kinerja sesuai target, sementara 5 indikator kerja di bawah target. Adapun rincian capaian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani dengan target 1 lembaga dan belum ada realisasi
2. Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif:
 - Jumlah teknologi modernisasi pertanian yang adaptif dengan target 1 teknologi dan belum ada realisasi
 - Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan dengan target 4 unit dan belum ada realisasi
3. Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani dengan Target 175 orang dan realisasi 29 orang.
4. Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang efektif dan efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima dengan target nilai 80,99% dan realisasi 81%.
5. Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas dengan target nilai 91 dan realisasi 68,75%.

Berdasarkan DIPA Revisi I Tahun 2026 total anggaran kegiatan BRMP Kepri sebesar Rp 4.099.973.000 dengan blokir sebesar Rp 2.373.000. Realisasi anggaran berdasarkan SPPD BRMP Kepulauan Riau pada Bulan Maret 2026 sebesar Rp 842.903.449 (**20,57%**) dari total pagu efektif.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	1
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja	2
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1. Visi	6
2.2. Misi	6
2.3. Tujuan.....	6
2.4. Perjanjian Kinerja	6
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. Capaian Kinerja	9
3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	11
BAB IV. PENUTUP.....	24
LAMPIRAN	25

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi BRMP Kepulauan Riau Tahun 2026	3
Gambar 2. Hubungan Komponen dan Indikator Pembangunan pada Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	13
Gambar 3. Grafik Realisasi LTT Reguler dan Padi Gogo di setiap kabupaten	19
Gambar 4. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi LTT Padi Sawah	20
Gambar 5. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi LTT Padi Gogo	20
Gambar 6. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi LTP	20

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Perjanjian Kinerja BRMP Kepulauan Riau Tahun 2026	7
Tabel 2. Program dan anggaran kegiatan BRMP Kepulauan Riau Tahun 2026.....	8
Tabel 3. Target dan realisasi kinerja BRMP Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2026	10
Tabel 4. Capaian kinerja lembaga penerap standar yang didampingi	11
Tabel 5. Capaian kinerja tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	12
Tabel 6. Capaian kinerja tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	12
Tabel 7. Capaian indikator penilaian Zona Integritas BRMP Kepulauan Riau	13
Tabel 8. Capaian IKPA BRMP Kepulauan Riau TW I Tahun 2026	14
Tabel 9. Nilai IKPA BRMP Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2026.....	15
Tabel 10. Target dan Realisasi LTT Padi Prov. Kepulauan Riau selama Triwulan I Tahun 2026 (Ha)	18
Tabel 11. Target dan Realisasi LTT Padi Gogo Prov. Kepulauan Riau selama Triwulan I Tahun 2026 (Ha)	18
Tabel 12. Target dan Realisasi LTP Provinsi Kepulauan Riau selama Triwulan I Tahun 2026 (Ha)	19
Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Triwulan I Tahun 2026	21
Tabel 14. Revisi Anggaran BRMP Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2026.....	21
Tabel 15. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BRMP Kepulauan Riau	23

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Balai TA. 2026	25

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit kerja di lingkungan pemerintahan. Setiap instansi pemerintah harus menyusun, membuat dan menyajikan Laporan Kinerja (LAKIN) yang menjelaskan terkait akuntabilitas capaian kinerja yang berisi keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi target instansi secara periodik. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara garis besar LAKIN berfungsi sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja suatu instansi pemerintah kepada masyarakat yang di dalamnya memberikan gambaran mengenai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, menunjukkan hambatan atau kendala dan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. LAKIN pada akhirnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya, dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, maka Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau sebagai instansi pemerintah yang merupakan satuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian berkewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja (Triwulan I, II, III dan IV) atas pencapaian kinerja, oleh karena itu disusunlah Laporan Capaian Kinerja Triwulan I Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau Tahun 2026 yang merupakan laporan hasil kinerja yang telah dicapai oleh BRMP Kepulauan Riau pada periode Triwulan I Tahun 2026 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati dan menjadi target kinerja BRMP Kepulauan Riau Tahun 2025.

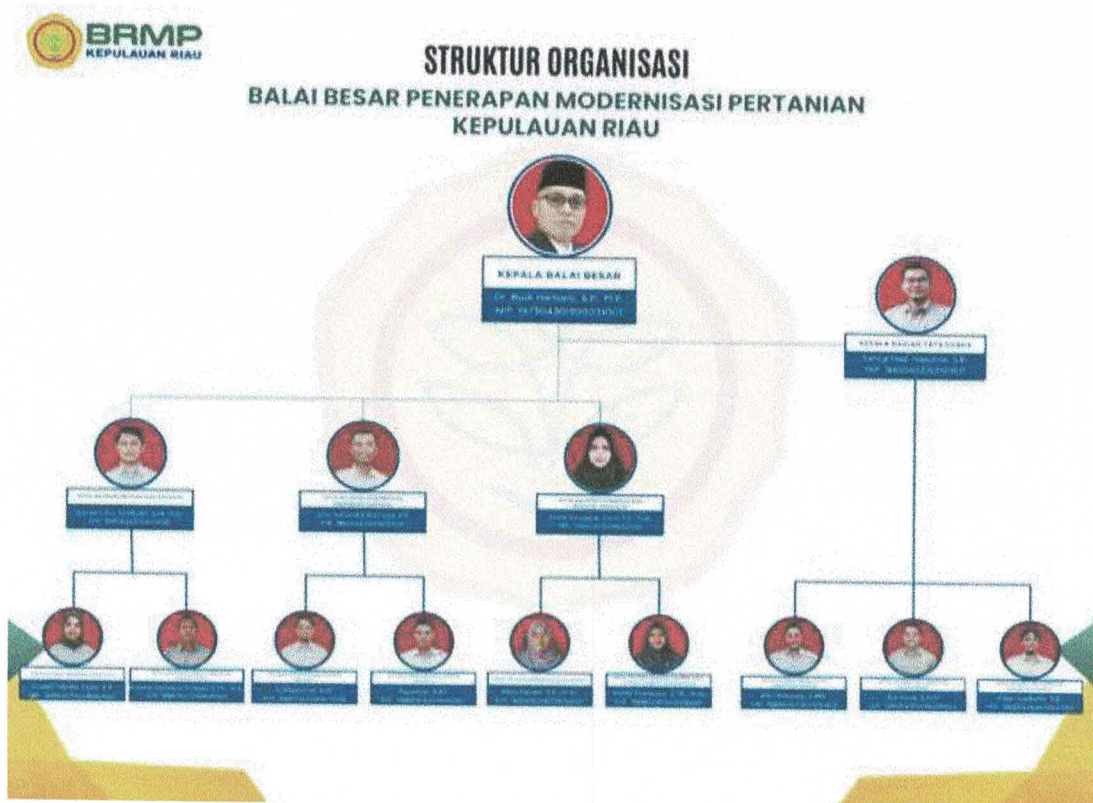
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau merupakan satuan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah koordinasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian. BRMP Kepulauan Riau mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasa paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. Adapun fungsi Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau berdasarkan Permentan Nomor 39 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
2. Pelaksanaan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
3. Pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern.
4. Pelaksanaan pengujian, diseminasi, pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi serta model pertanian modern.
5. Pelaksanaan produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit, dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan program Pembangunan pertanian.
7. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
8. Pelaksanaan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian.
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian.

1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau berada di bawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian. BRMP Kepulauan Riau dipimpin oleh Kepala Balai Besar dan Balai Besar sendiri mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi, serta modernisasi pertanian. BRMP Kepulauan Riau terdiri atas: Kepala Bagian Tata Usaha serta kelompok jabatan fungsional. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, kepegawaian, tata usaha dan rumah tangga, serta penatausahaan barang milik negara. Jabatan fungsional yang ada di BRMP Kepulauan Riau terdiri dari jabatan fungsional Penyuluh Pertanian, Pengawas Mutu Pakan, Keuangan, Arsiparis, dan pejabat fungsional umum. Struktur organisasi BRMP Kepulauan Riau tahun 2026 berdasarkan Permentan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Struktur Organisasi BRMP Kepulauan Riau Tahun 2026

Berdasarkan Kepmentan Nomor 128/Kpts/HK.150/M/02/2026 tentang Perubahan atas Kepmentan Nomor 649/KPTS/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai dibantu oleh:

a. Kelompok Program dan Pengujian

Kelompok Program dan Pengujian BRMP Kepulauan Riau diketuai oleh Apriyani Nur Sariffudin, S.Pt., M.Sc dengan tugas 1) penyusunan rencana program dan anggaran dibidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; 2) pelaksanaan pengujian, diseminasi, pengembangan dan penerapan paket teknologi spesifik lokasi, serta model pertanian modern; dan 3) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian. Kelompok Program dan Pengujian mempunyai 2 Tim Kerja yaitu:

1. Tim Kerja Program dan Evaluasi

Tugasnya melakukan penyusunan rencana program dan anggaran serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.

2. Tim Kerja Pengujian Teknologi Spesifik Lokasi

Tugasnya melakukan pengujian, diseminasi, pengembangan, penerapan paket teknologi spesifik lokasi, dan model pertanian modern serta koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta

modernisasi pertanian

b. Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian

Kelompok Pendampingan dan Modernisasi Pertanian BRMP Kepulauan Riau diketuai oleh Jonri Suhendra Sitompul, SP dengan tugas 1) pelaksanaan identifikasi dan verifikasi kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan paket teknologi spesifik lokasi dan model pertanian modern; dan 2) fasilitasi dan pendampingan program Pembangunan pertanian. Kelompok Pendampingan dan Modernisasi Pertanian mempunyai 2 Tim Kerja yaitu:

1. Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah I

Tugasnya melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan teknologi spesifik lokasi dan model pertanian modern serta melaksanakan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian wilayah I.

2. Tim Kerja Pendampingan Program Wilayah II

Tugasnya melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kebutuhan teknologi, perekayasaan, pengujian, diseminasi, penerapan teknologi spesifik lokasi dan model pertanian modern serta melaksanakan fasilitasi dan pendampingan program pembangunan pertanian wilayah II.

c. Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian

Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian BRMP Kepulauan Riau diketuai oleh Firsta Anugerah Sariri, S.P., M.Si dengan tugas 1) pelaksanaan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; 2) pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; 3) bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian; dan 4) produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian mempunyai 2 Tim Kerja yaitu:

1. Tim Kerja Penerapan dan Diseminasi

Tugasnya melakukan koordinasi di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian dan melaksanakan bimbingan teknis di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian.

2. Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan dan Penilaian Kesesuaian

Tugasnya melakukan pendayagunaan dan kerja sama di bidang penerapan hasil perakitan dan perekayasaan paket teknologi spesifik lokasi serta modernisasi pertanian produksi benih/bibit sumber, sertifikasi benih/bibit dan penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

d. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha BRMP Kepulauan Riau dipimpin oleh Kepala Bagian Tata

Usaha, Hadi Nasution, SP. Adapun Bagian Tata Usaha ini meliputi:

1. Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Tugasnya melaksanakan urusan sumber daya manusia dan penyiapan bahan fasilitasi reformasi birokrasi Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

2. Tim Kerja Tata Usaha dan Rumah Tangga

Tugasnya melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, persuratan, kearsipan, dan kehumasan Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian.

3. Tim Kerja Keuangan dan Barang Milik Negara

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, sarana dan prasarana, urusan perbendaharaan, penerimaan negara bukan pajak, pengujian surat perintah membayar, serta akuntansi dan verifikasi keuangan, dan penatausahaan barang milik negara Balai Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Visi

Visi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau mengacu kepada visi Kementerian Pertanian tahun 2025-2029 yaitu "Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" dan visi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yaitu "Mewujudkan Lembaga Unggul dalam Perekayasaan dan Perakitan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif dalam Mendukung Pertanian Maju", maka visi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau ke depan yaitu "Menjadi Lembaga Unggulan dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Pertanian Terapan Modern yang Inovatif untuk Mendukung Pertanian Maju Berkelanjutan".

2.2. Misi

Misi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau selaras dengan misi BRMP untuk mendukung misi Kementerian Pertanian mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

- a. Melaksanakan perekayasaan dan pengembangan paket teknologi spesifik lokasi yang inovatif, adaptif, dan aplikatif sesuai kebutuhan pembangunan pertanian nasional;
- b. Melaksanakan penerapan, diseminasi dan peningkatan kapasitas penerap standar di bidang modernisasi pertanian;
- c. Mengembangkan metode dan pengelolaan produksi benih/bibit sumber spesifik Lokasi;
- d. Mengembangkan model teknologi pertanian terapan yang mendukung peningkatan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan usaha tani;
- e. Melaksanakan penilaian kesesuaian Standar Nasional Indonesia dibidang pengembangan dan penerapan modernisasi pertanian.

2.3. Tujuan

Tujuan penjabaran dari visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terwujudnya lembaga penerap standar yang didampingi;
- b. Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif
- c. Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani Meningkatkan produksi instrumen pertanian terstandar;
- d. Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima;
- e. Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

2.4. Perjanjian Kinerja

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau berada dibawah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala BRMP. Sejalan dengan mekanisme perencanaan seperti tertuang dalam Undang-

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I BRMP Kepulauan Riau Tahun 2026

undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Rencana Kinerja Tahun 2026 merupakan penjabaran dari rencana kerja (Renja) tahunan. Renja merupakan rencana kerja tahunan di tingkat kementerian atau lembaga yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sementara RKP merupakan rencana kerja pemerintah tahunan (*annual plan*) yang merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan Kementerian jangka menengah (RPJM Kementerian), yang terdokumentasikan dalam Renstra.

Perencanaan ditetapkan berdasarkan kebutuhan stakeholder (*bottom up*) diselaraskan dan mengakomodasi program yang bersifat *top down* sehingga kebijakan perencanaan anggaran ditetapkan sesuai rencana kinerja yang disepakati melalui Perjanjian Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja. Pada tahun 2026 BRMP Kepulauan Riau telah menetapkan target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Balai dengan Kepala BRMP. Adapun Perjanjian Kinerja BRMP Kepulauan Riau Tahun 2026 terdiri dari 5 sasaran kegiatan dengan 6 indikator kinerja utama. Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BRMP Kepulauan Riau Tahun 2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	1
2.	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	Teknologi	1
		Jumlah Benih/ bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan	Unit	4
3.	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming dan modern	Orang	175
4.	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau (Nilai)	Nilai (0-100)	80,99
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	Nilai (0-100)	91

Sumber: Data Primer, 2026

Ke lima sasaran kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari program yang diemban oleh BRMP Kepulauan Riau Tahun 2026. Ke lima sasaran tersebut merupakan pengembangan dari sasaran kegiatan di tahun 2025, karena adanya peningkatan *eselonering* BRMP Kepulauan Riau dari Eselon III.a menjadi Eselon II.b. Program dan anggaran kegiatan BRMP Kepulauan Riau tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Program dan anggaran kegiatan BRMP Kepulauan Riau Tahun 2026

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
	Program Nilai Tambah Daya Saing Industri	4.745.000
1	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	4.745.000
	Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	164.713.000
2	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	164.713.000
	Dukungan Manajemen	3.930.515.000
3	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	3.930.515.000

Sumber: Data Primer, 2026

Dalam menjalankan tupoksinya sebagai Unit Kerja dibidang penerapan modernisasi pertanian spesifik lokasi, BRMP Kepulauan Riau pada Bulan Maret Tahun 2026 didukung oleh sumber dana yang berasal dari dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan total anggaran sebesar Rp4.099.973.000 dengan blokir sebesar Rp2.373.000. Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi anggaran tanpa mengurangi aspek akuntabilitas serta keberlangsungan operasional satuan kerja. Sampai dengan akhir bulan Maret 2026, total realisasi anggaran berdasarkan SPPD sebesar Rp 842.903.449 (**20,57%**) dari pagu efektif.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau selalu berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (*Input*), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (Proses) serta keluaran (*Output*). Metode yang digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Penerapan *monitoring* dan evaluasi kegiatan berdasarkan perjanjian kinerja dilakukan secara periodik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilaksanakan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara periodik beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi, dengan demikian kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak dini. Salah satu bentuk *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan adalah dengan pelaksanaan *monev ex-ante*, *monev on going*, *monev ex-post*, dan pelaporan bulanan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2026, BRMP Kepulauan Riau memiliki lima sasaran kegiatan yaitu 1) Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani; 2) Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif; 3) Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani; 4) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan 5) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Selanjutnya ke lima sasaran tersebut diukur dengan 6 indikator kinerja yaitu (1.1.) Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga); (2.1) Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif (Teknologi); (2.2) Jumlah benih/ bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit); (3.1) Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern (Orang); (4.1) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau (Nilai); dan (5.1) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau (Nilai).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Triwulan I, secara umum capaian Kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2026 termasuk dalam kategori **Tidak Berhasil**. Penerapan kategori ini mengacu pada kriteria penilaian yang digunakan oleh Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, yang mengelompokkan capaian kinerja ke dalam empat kategori, yaitu: (1) Sangat Berhasil untuk capaian di atas 100%; (2) Berhasil untuk capaian 80–100%; (3) Cukup Berhasil untuk capaian 70–79%; dan (4) Tidak Berhasil untuk capaian 0–59%. Adapun rincian hasil pengukuran capaian kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau Tahun 2026 disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Target dan realisasi kinerja BRMP Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	1	-	0
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	Teknologi	1	-	0
		Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	Unit	4	-	0
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern	Orang	175	29	16,57
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	Nilai (0-100)	80,99	81	100,01
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	Nilai (0-100)	91	68,75	75,54
Capaian Indikator Kinerja						32,01

Sumber: Data Primer, 2026

Capaian Indikator Kinerja BRMP Kepulauan Riau pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 32,01% dan termasuk dalam kategori **Tidak Berhasil**. Pada indikator penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani serta penyediaan teknologi modernisasi pertanian yang adaptif, termasuk produksi benih/ bibit sumber spesifik lokasi, belum terdapat realisasi (0%). Hal ini disebabkan oleh belum dimulainya kegiatan teknis, yang dipengaruhi

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I BRMP Kepulauan Riau Tahun 2026

oleh struktur anggaran yang kurang ideal akibat kebijakan pemotongan RO Khusus. Di sisi lain, indikator penerapan pertanian modern oleh petani mulai menunjukkan perkembangan awal, dengan capaian sebanyak 29 orang dari target 175 orang atau sebesar 16,57%. Hal ini mengindikasikan bahwa implementasi teknologi pertanian modern telah mulai berjalan, meskipun masih dalam tahap terbatas. Untuk indikator kinerja strategis lainnya, pada aspek tata kelola anggaran, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) hingga akhir Maret 2026 tercatat sebesar 68,75 atau mencapai 75,54% dari target tahunan sebesar 91, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran. Sementara itu, indikator pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/ WBBM telah mencapai nilai 81 dari target 80,99 atau sebesar 100,01% yang berarti telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian nilai ZI tersebut merupakan hasil penilaian mandiri, dengan sebagian dokumen masih mengacu pada dokumen tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, capaian kinerja pada Triwulan I masih didominasi oleh proses penyesuaian dan belum sepenuhnya mencerminkan hasil pelaksanaan kegiatan teknis. Meskipun demikian, terdapat indikasi perkembangan pada beberapa indikator kinerja utama.

3.2. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

3.2.1. Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Target dan realisasi kinerja Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Kepulauan Riau pada periode Triwulan I Tahun 2026 dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani

Sasaran 1 berupa Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani dengan Indikator Kinerja yaitu jumlah Lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan (Lembaga). Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Capaian kinerja lembaga penerap standar yang didampingi

Indikator Kinerja 1	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	Lembaga	1	-	0%

Indikator kinerja 1: Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan dapat dilihat pada Tabel 5 mendapat nilai capaian kinerja sebesar 0% atau belum dapat berjalan. Kondisi tersebut disebabkan oleh belum dimulainya kegiatan teknis akibat struktur anggaran kegiatan yang tidak ideal karena adanya pemotongan RO Khusus.

Sasaran 2

Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif

Sasaran 2: Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif (Teknologi) dan Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan (Unit). Capaian dari kedua indikator ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian kinerja tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif

Indikator Kinerja 2	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	Teknologi	1	-	0%
Jumlah benih/bibit sumber spesifik lokasi yang dihasilkan	Unit	4	-	0%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa Sasaran 2 terkait Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif juga mendapat nilai capaian kinerja sebesar 0% atau belum dapat berjalan. Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh adanya pemotongan RO Khusus sehingga kegiatan belum dapat dimulai.

Sasaran 3

Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani

Sasaran 3: Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern (Orang). Capaian dari indikator ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian kinerja tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif

Indikator Kinerja 3	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, <i>smart farming</i> , dan modern	Orang	175	29	16,57%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran 3 terkait Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani mendapat nilai capaian kinerja sebesar 16,57%. Hal ini diperoleh dari hasil survei yang dilakukan oleh Tim BRMP Kepri terhadap petani yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner melalui *google form* yang telah disediakan.

Sasaran 4

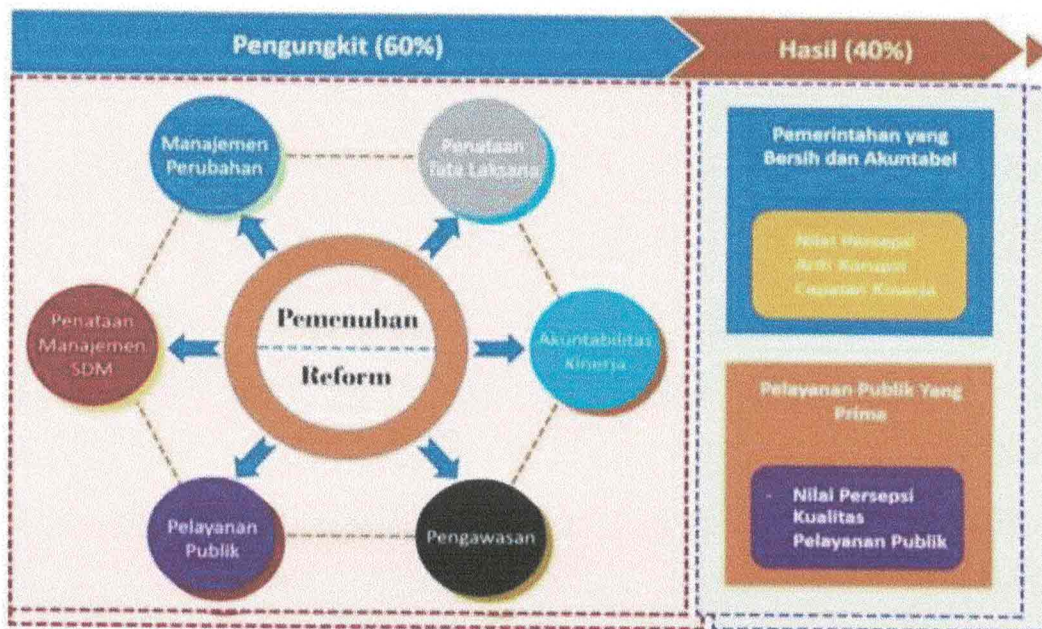
Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

Sasaran 4: Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau. Capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian indikator penilaian Zona Integritas BRMP Kepulauan Riau

Indikator Kinerja 4	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	Nilai	80,99	81	100,01%

Berdasarkan Tabel 7, sasaran kinerja “Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima” telah tercapai. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau, dengan nilai sebesar 81 atau 100,01% dari target yang ditetapkan sebesar 80,99. Capaian tersebut diperoleh melalui penilaian mandiri, dengan sebagian dokumen yang digunakan masih mengacu pada dokumen tahun 2025. Zona Integritas (ZI) diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Dalam regulasi tersebut, Zona Integritas diartikan sebagai instansi pemerintah yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Zona Integritas terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit mencerminkan aspek tata kelola internal (*governance*) pada unit kerja, sedangkan komponen hasil menggambarkan dampak atau manfaat yang dirasakan oleh pemangku kepentingan sebagai hasil dari perbaikan pada komponen pengungkit. Berikut disajikan gambaran yang menunjukkan keterkaitan antara masing-masing komponen dan indikator dalam pembangunan Zona Integritas.



Gambar 2. Hubungan Komponen dan Indikator Pembangunan pada Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Sasaran 5

Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas

Sasaran 5: Terkelolanya anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang akuntabel dan berkualitas memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau. Adapun capaian indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Capaian IKPA BRMP Kepulauan Riau TW I Tahun 2026

Indikator Kinerja 5	Satuan	Target	Capaian	Kinerja
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	Nilai	91	68,75	75,54%

Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian target Sasaran 5 pada Triwulan I mencapai 75,54% atau sebesar 68,75 dari target nilai 91. Perlu diketahui bahwa mulai Januari 2026, layanan OMSPAN dan MONSAKTI telah dialihkan ke aplikasi *MyIntress*. Proses migrasi dari OMSPAN tahun 2025 (atau versi sebelumnya) ke sistem baru pada tahun 2026 dilakukan melalui platform *MyIntress* yang digunakan untuk *monitoring* transaksi dan anggaran negara. Oleh karena itu, pemantauan nilai IKPA saat ini dilakukan melalui aplikasi *MyIntress* pada tautan berikut: <https://myintress.kemenkeu.go.id/layout>. Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Belanja Kementerian Negara/Lembaga, IKPA merupakan instrumen evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk memperkuat prinsip *value for money* dalam belanja K/L, mendorong percepatan realisasi anggaran dan pencapaian output, serta memastikan perlakuan yang adil (*fairness*) dalam penilaian kinerja pada tingkat satuan kerja, unit Eselon I, dan kementerian/lembaga. Selanjutnya, nilai IKPA diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu: (1) Sangat Baik jika nilai IKPA > 95; (2) Baik jika nilai IKPA 89–94; (3) Cukup jika nilai IKPA 70–88; dan (4) Kurang jika nilai IKPA < 70. Berdasarkan hasil penilaian Triwulan I Tahun 2026, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau memperoleh nilai IKPA sebesar 68,75 yang termasuk dalam kategori **Kurang**. Rincian capaian pada setiap aspek Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BRMP Kepulauan Riau pada Triwulan I Tahun 2026 selanjutnya disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9. Nilai IKPA BRMP Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2026

No	Aspek Pengukuran	Indikator Pengukuran	Nilai Capaian	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
1	Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100,00	10	10,00	100
		Deviasi Hal III DIPA	100,00	15	15,00	
2	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	100,00	20	20,00	100
		Belanja Kontraktual	0,00	0	0,00	
		Penyelesaian Tagihan	0,00	0	0,00	
		Pengelolaan UP dan TUP	100,00	10	10,00	
3	Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	0,00	25	0,00	0,00
Total Nilai						55
Konversi Bobot (%)						80,00%
Dispensasi SPM (Pengurangan)						0,00
Total Nilai Akhir (Nilai Total/ Konversi Bobot)						68,75

Berdasarkan Tabel 9, capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BRMP Kepulauan Riau pada Triwulan I Tahun 2026 berada pada kategori **Kurang** dengan nilai sebesar 68,75. Secara rinci, Aspek Perencanaan Anggaran memperoleh nilai 100 (Sangat Baik), Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran juga memperoleh nilai 100 (Sangat Baik), sedangkan Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran hanya mencapai 0% (Kurang). Di antara ketiga aspek tersebut, nilai terendah terdapat pada Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Kondisi ini disebabkan karena capaian *output* kegiatan belum dapat direkam dalam sistem aplikasi. Berdasarkan informasi dari Sekretariat BRMP, hingga tanggal 7 April seluruh RO pada lingkup BRMP telah berada pada status *approved* sampai dengan tingkat DJA. Kendala yang menyebabkan satuan kerja belum dapat melakukan proses *input* capaian *output* telah dikoordinasikan baik dengan Kementerian Pertanian maupun Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Saat ini, tim DSP DJA tengah melakukan penelaahan serta berkoordinasi dengan Direktorat Pelaksanaan Anggaran (Dit. PA) DJPb Kementerian Keuangan guna membuka akses pada aplikasi SAKTI agar proses *input* capaian *output* dapat segera dilakukan.

3.2.2. Keberhasilan, Kendala, dan Langkah Antisipasi

Capaian kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau pada Triwulan I Tahun 2026, meskipun secara umum masih berada pada kategori **Tidak Berhasil** dengan capaian sebesar **32,01%**, tetap menunjukkan adanya perkembangan pada beberapa indikator kinerja utama. Hal ini tercermin dari mulai adanya realisasi pada indikator penerapan pertanian modern oleh petani, yaitu sebanyak 29 orang dari target 175 orang atau sebesar 16,57%, yang mengindikasikan bahwa implementasi teknologi pertanian modern telah mulai berjalan walaupun masih terbatas. Selain itu, pada aspek tata kelola anggaran, capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) mencapai 68,75 atau 75,54% dari target tahunan sebesar 91, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan anggaran. Di sisi lain, indikator pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM telah mencapai nilai 81 atau sebesar 100,01% dari target, yang menandakan bahwa komitmen terhadap reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik telah berjalan dengan baik, meskipun penilaian masih menggunakan sebagian dokumen tahun sebelumnya.

Pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I Tahun 2026 belum sepenuhnya berjalan optimal. Kendala utama yang dihadapi adalah struktur anggaran kegiatan yang belum ideal sebagai dampak dari kebijakan pemotongan pada RO Khusus. Kondisi ini menyebabkan komposisi dan proporsi anggaran belum sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan kegiatan, khususnya untuk kegiatan teknis yang memerlukan dukungan pembiayaan operasional di lapangan. Akibatnya, beberapa indikator kinerja seperti penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani serta penyediaan teknologi modernisasi pertanian, termasuk produksi benih/bibit sumber spesifik lokasi, belum menunjukkan realisasi (0%). Selain itu, proses penyesuaian anggaran memerlukan tahapan administrasi lanjutan berupa revisi dokumen perencanaan dan penganggaran yang membutuhkan waktu serta koordinasi dengan berbagai pihak, sehingga pelaksanaan kegiatan teknis belum dapat dimulai secara optimal pada periode ini.

Sebagai upaya mengatasi kendala tersebut, langkah yang akan dilakukan adalah mengusulkan revisi DIPA untuk menyesuaikan kembali struktur anggaran kegiatan agar lebih proporsional dan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan di lapangan. Proses revisi ini akan difasilitasi oleh Sekretariat BRMP sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Selain itu, akan dilakukan peningkatan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait guna mempercepat pelaksanaan program kegiatan Tahun 2026. Optimalisasi pengelolaan anggaran serta percepatan proses *input* capaian *output* juga menjadi fokus pada periode berikutnya, sehingga diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih efektif dan capaian kinerja dapat meningkat sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

3.2.3. Capaian Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya yang dicapai oleh Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau di Triwulan I Tahun 2026 selain dari target dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi adalah melakukan

Laporan Capaian Kinerja Triwulan I BRMP Kepulauan Riau Tahun 2026

Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian. Hal ini sudah ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 166/Kpts/PW.020/M/02/2026 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/ Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan. Di mana di dalam Kepmentan tersebut disebutkan bahwa BBPPMP Kepulauan Riau mempunyai target sebesar 222 Hektar (LTT Reguler), 49 Hektar (LTT Padi Gogo), 194 Hektar (LTP Padi), 6 Ton Serap Gabah Bulog, 17 Ton Serap Jagung Bulog dan 998 Ton Serap Pupuk Subsidi. Dikarenakan belum tersedianya anggaran khusus untuk melakukan Pendampingan Program Strategis Kementerian Pertanian, kegiatan yang saat ini dilakukan yaitu difokuskan untuk mendampingi tercapainya target Luas Tambah Tanam Padi Reguler dan Padi Gogo Provinsi di Kabupaten Bintan. Hal-hal yang sudah dilakukan untuk mendukung kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan (DKPPKH) Provinsi Kepulauan Riau terkait Program Strategis Kementerian Pertanian
- b. Memastikan tercapainya target LTT yang telah ditetapkan, di setiap Kabupaten oleh masing-masing Penanggung Jawab Kabupaten.
- c. Melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap luas tambah tanam (LTT) reguler dan LTT padi gogo di Kabupaten Bintan. Kegiatan pendampingan juga dimaksudkan untuk memberikan solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang ada di lapangan serta mengidentifikasi potensi dan tantangan yang dapat mempengaruhi produktivitas padi.
- d. Merekap data terkait Luas Tambah Tanam (LTT) Reguler, LTT Padi Gogo dan Luas Tambah Panen (LTP) yang telah dilaporkan sebelumnya oleh penyuluh daerah. Hal ini bertujuan untuk menyamakan data sehingga data LTT yang akan dilaporkan di setiap hari ataupun setiap bulan itu sama (tidak ada selisih).

Hasil pendampingan LTT padi sawah dan padi gogo di lingkup Provinsi Kepulauan Riau selama Januari-Maret (Triwulan I) Tahun 2026 menunjukkan bahwa capaian LTT Reguler atau Padi Sawah Provinsi Kepulauan Riau sebesar **28,82 Hektar**, sedangkan untuk capaian LTT Padi Gogo sebesar **11,3 Hektar** sehingga total realisasi LTT secara keseluruhan di Provinsi Kepulauan Riau sebesar **40,12 Hektar**. Sementara itu, data LTP Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan Triwulan I mencapai **60,67 Hektar**. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 10, Tabel 11, dan Tabel 12.

Tabel 10. Target dan Realisasi LTT Padi Prov. Kepulauan Riau selama Triwulan I Tahun 2026 (Ha)

No	Kabupaten	Target LTT Pusat	Realisasi			Total
			Januari	Februari	Maret	
1.	Kep. Anambas	29	2,00	4,52	2,30	8,82
2.	Lingga	40	-	0,20	1,00	1,20
3.	Karimun	3	0,40	-	-	0,40
4.	Natuna	118	6,50	2,70	1,25	10,45
5.	Bintan	32	5,00	0,50	2,45	7,95
Total		222	13,90	7,92	7,00	28,82

Sumber: Data Primer, 2026

Tabel 11. Target dan Realisasi LTT Padi Gogo Prov. Kepulauan Riau selama Triwulan I Tahun 2026 (Ha)

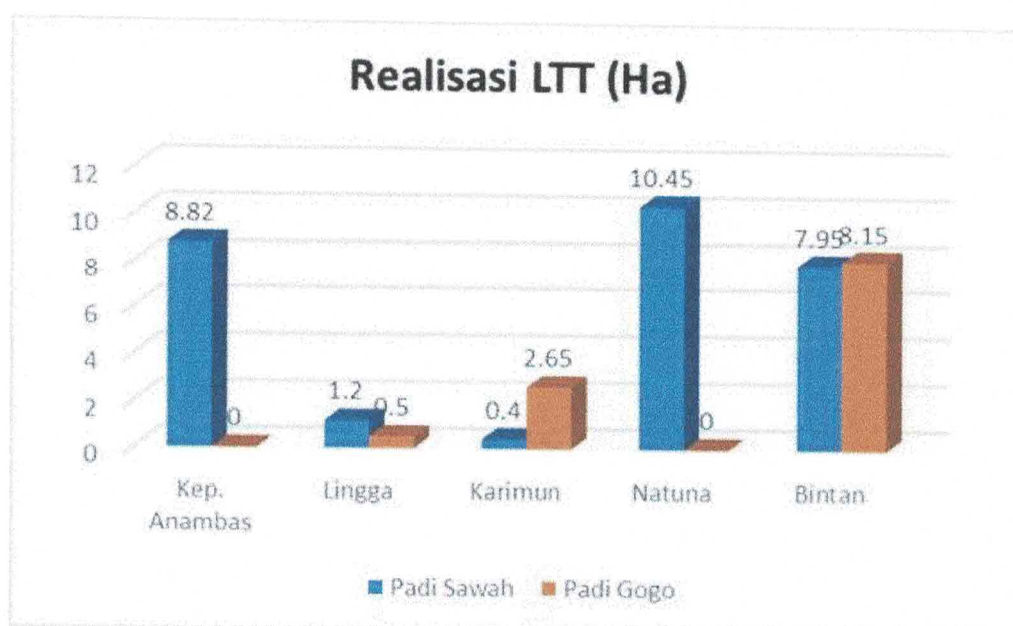
No	Kabupaten	Target LTT Padi Gogo	Realisasi			Total
			Januari	Februari	Maret	
1.	Kep. Anambas	1	-	-	-	-
2.	Lingga	5	-	0,50	-	0,50
3.	Karimun	7	1,75	0,90	-	2,65
4.	Natuna	14	-	-	-	-
5.	Bintan	22	3,35	4,80	-	8,15
Total		49	5,1	6,2	-	11,3

Sumber: Data Primer, 2026

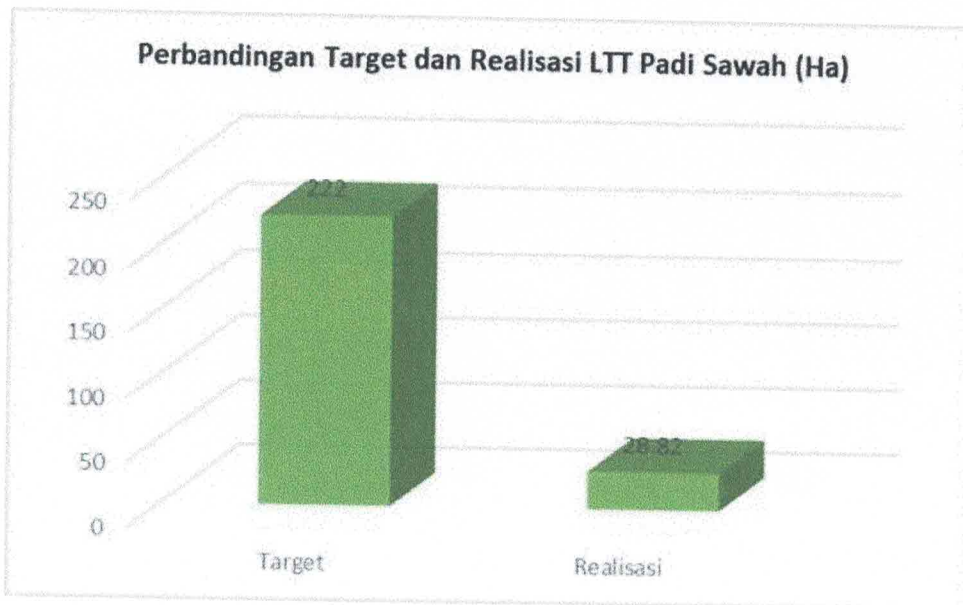
Tabel 12. Target dan Realisasi LTP Provinsi Kepulauan Riau selama Triwulan I Tahun 2026 (Ha)

No	Kabupaten	Target LTP Pusat	Realisasi			Total
			Januari	Februari	Maret	
1.	Kep. Anambas	25	3,40	1,50	-	4,90
2.	Lingga	35	3,25	2,00	1,25	6,50
3.	Karimun	3	0,25	-	-	0,25
4.	Natuna	103	10,40	6,52	14,00	30,92
5.	Bintan	28	12,25	4,00	1,85	18,10
Total		194	29,55	14,02	17,10	60,67

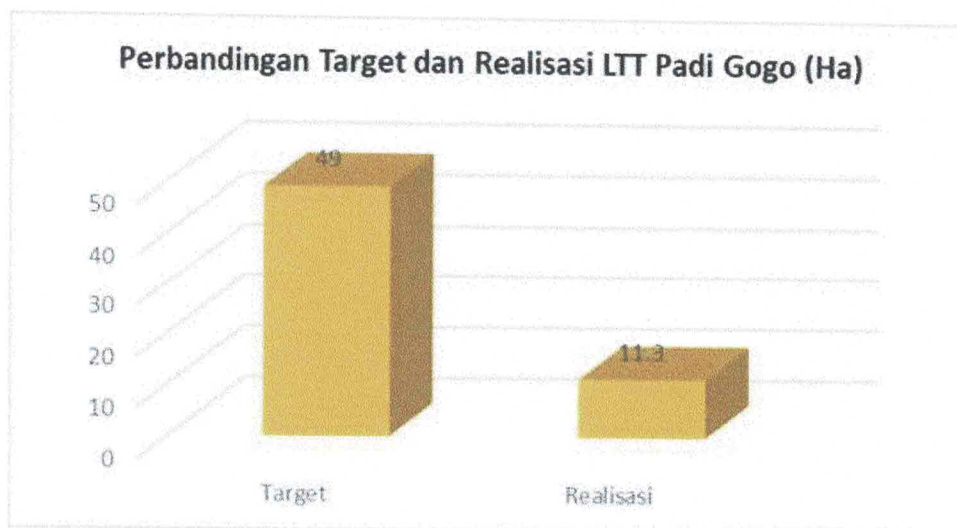
Sumber: Data Primer, 2026



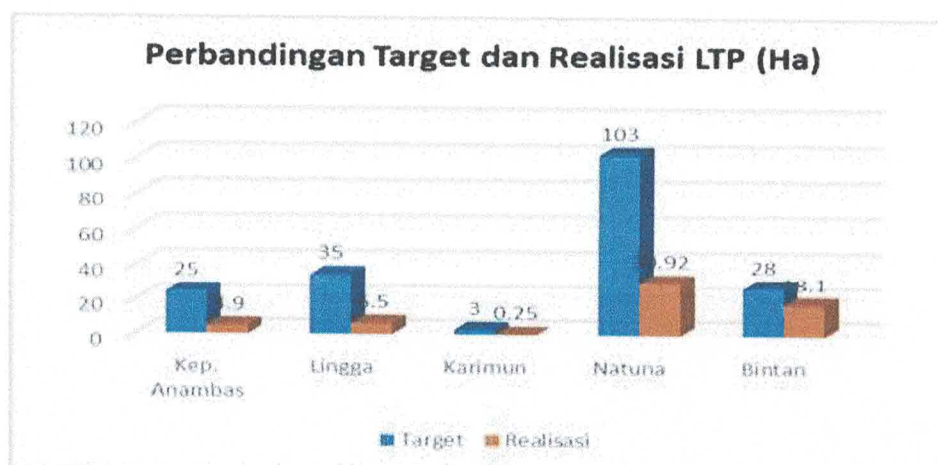
Gambar 3. Grafik Realisasi LTT Reguler dan Padi Gogo di setiap kabupaten



Gambar 4. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi LTT Padi Sawah



Gambar 5. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi LTT Padi Gogo



Gambar 6. Grafik Perbandingan Target dan Realisasi LTP

3.2.4. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang penerapan modernisasi pertanian spesifik lokasi, BRMP Kepulauan Riau pada Triwulan I Tahun 2026 didukung oleh sumber dana yang berasal dari dana APBN dalam bentuk Rupiah Murni (RM) dan PNPB. Realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (RKA-K/L). Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Anggaran dan Realisasi Triwulan I Tahun 2026

No	Program/ Kegiatan	Pagu DIPA Revisi (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran Blokir (Rp/000)	Realisasi (%)
1.	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	4.745.000	0	2.373.000	0
2.	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	164.713.000	5.100.000	-	3,09
3.	Dukungan Manajemen	3.930.515.000	837.803.449	-	21,32
Jumlah		4.099.973.000	842.903.449	2.373.000	

Dari total anggaran DIPA BRMP Kepulauan Riau Tahun 2026 sejumlah **Rp 4.099.973.000** telah direalisasikan belanja sampai dengan tanggal 31 Maret 2026 sebesar **Rp 842.903.449** atau **20,57%** dari anggaran DIPA sedangkan pagu terblokir sebesar Rp 2.373.000. Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2026 masih didominasi oleh kegiatan yang berasal dari Program Dukungan Manajemen. Dalam pelaksanaan anggaran, digunakan prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta transparan. Nilai manfaat dari penggunaan anggaran yang didukung oleh tertib administrasi juga sangat diperhatikan. Seiring dengan adanya dinamika perubahan kebijaksanaan nasional, maka dilakukan revisi anggaran. Pada periode Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan sebanyak 1 kali revisi DIPA yaitu revisi DIPA ke-2. Revisi DIPA ke-1 telah dilakukan di akhir tahun 2025 tepatnya pada tanggal 28 Desember 2025 akibat adanya RO Khusus. Data Revisi disajikan pada Tabel 9 dan realisasi BRMP Kepri disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Revisi Anggaran BRMP Kepulauan Riau Triwulan I Tahun 2026

Revisi Ke	Tanggal Terbit DIPA	Jenis Revisi	Pagu (Rp)		Keterangan
			Semula	Menjadi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dipa Awal	1 Desember 2025	DIPA Awal	4.857.716.000	4.857.716.000	DIPA Awal BRMP Kepri.

Revisi_1	28 Desember 2025	Revisi DIPA	4.857.716.000	4.099.973.000	Revisi dilakukan karena adanya Kebijakan terkait RO Khusus.
Revisi_2	14 Februari 2026	Revisi DIPA	4.099.973.000	4.099.973.000	Revisi Halaman III DIPA Triwulan I

3.2.5. Pengelolaan PNBP

BRMP Kepulauan Riau merupakan salah satu satker penghasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP). Pada Tahun 2026 target setoran PNBP BRMP Kepulauan Riau sebesar Rp6.740.000 (Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari 1) Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya; 2) Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan; dan 3) Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi . Sampai dengan tanggal 10 April 2026, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak BRMP Kepulauan Riau sebesar Rp500.000. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BRMP Kepulauan Riau

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	6.500.000	0	0
2	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	240.000	0	0
3	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	500.000	0
	Total	6.740.000	500.000	7,42

BAB IV. PENUTUP

Pada tahun anggaran 2026 BRMP Kepulauan Riau telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 5 sasaran kegiatan yaitu 1) Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani; 2) Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif; 3) Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani; 4) Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; 5) Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas. Jumlah total pagu anggaran pada DIPA Revisi ke-2 BRMP Kepulauan Riau sebesar Rp 4.099.973.000. Hasil pengukuran capaian kinerja di BRMP Kepulauan Riau pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar 32,01% atau termasuk kategori **Tidak Berhasil**.

Indikator Kinerja dari sasaran pertama yaitu Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan dengan capaian 0 Lembaga. Indikator Kinerja dari sasaran kedua antara lain: 1) Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif dengan capaian 0 Teknologi; dan 2) Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan dengan capaian 0 Unit. Indikator Kinerja sasaran ketiga yaitu Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, *smart farming*, dan modern, di mana pada Triwulan I telah mencapai 29 Orang dari 175 target. Indikator Kinerja sasaran keempat yaitu Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau dengan nilai capaian sebesar 81 dari target 80,99 atau 100,01%. Sementara itu untuk Indikator Kinerja sasaran kelima yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau mencapai 68,75 dari target 91 atau 75,54%.

Secara umum kegiatan di BRMP Kepulauan Riau pada Triwulan I Tahun 2026 belum berjalan dengan baik dikarenakan struktur anggaran kegiatan yang belum ideal akibat adanya kebijakan RO Khusus, sehingga memerlukan penyesuaian kembali melalui mekanisme revisi DIPA. Kondisi ini berdampak pada perubahan komposisi dan proporsi anggaran kegiatan, yang menyebabkan pagu anggaran belum sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan, khususnya untuk kegiatan teknis yang memerlukan dukungan pembiayaan operasional dan pelaksanaan di lapangan. Akibatnya, beberapa tahapan kegiatan yang telah direncanakan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, penyesuaian struktur anggaran juga memerlukan proses administrasi lanjutan berupa revisi dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Proses revisi tersebut membutuhkan waktu serta koordinasi dengan pihak terkait, sehingga pelaksanaan kegiatan teknis belum dapat segera dimulai pada Triwulan I.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Kepala Balai TA. 2026



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
JALAN PELABUHAN SUNDAI JANG NO. 38 TANJUNGPINANG
TELEPON (0771) 22153, FAKSIMILI (0771) 21085
WEBSITE: kemp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Tohir Harahap

Jabatan : Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry

Jabatan : Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Desember 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadry Djufry

Ahmad Tohir Harahap

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KEPULAUAN RIAU

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	SATUAN
1	Terwujudnya penerapan standar pertanian oleh pelaku usaha tani	1.1. Jumlah lembaga penerap standar yang mendapatkan pendampingan	1	Lembaga
2	Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	2.1. Jumlah Teknologi Modernisasi Pertanian yang Adaptif	1	Teknologi
		2.2. Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	4	Unit
3	Terwujudnya penerapan pertanian modern oleh petani	3.1. Jumlah petani yang menerapkan teknologi digital, smart farming, dan modern	175	Orang
		LAINNYA		
4	Terwujudnya Birokrasi Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	4.1. Nilai Pembangunan zona integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	80,99	Nilai (0-100)
5	Terkelolanya Anggaran Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	5.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Kepulauan Riau	91,00	Nilai (0-100)

Kode	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
EC	Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 4.745.000
7911	Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Bidang Pertanian	Rp 4.745.000
HA	Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 164.713.000
7912	Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 164.713.000
WA	Dukungan Manajemen	Rp 3.930.515.000
6918	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Rp 3.930.515.000

Total anggaran terblokir senilai Rp 2.373.000 terdiri dari:

- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri Rp 2.373.000
- Program Ketersediaan Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Rp 0
- Program Dukungan Manajemen Rp 0

Tanjungpinang, Desember 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry

Ahmad Tohir Harahap

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2026

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Tersedianya teknologi modernisasi pertanian yang adaptif	Jumlah benih/ bibit sumber spesifik Lokasi yang dihasilkan	Benih Sumber Tanaman Hortikultura Lainnya Spesifik Lokasi	1	Ton
		Benih Sumber Padi Spesifik Lokasi	3	Ton
		TOTAL	4	Ton